



LOGOS

JURNAL PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK

<https://ejournal-stpakambon.id/index.php/JL>

Menerima ‘Yang Lain’: Fenomenologi Pemberian Jean-Luc Marion Dan Relevansinya Bagi Toleransi Dalam Masyarakat

Gabriel Junior Ell, ^{a, 1}

^a Seminari Tinggi Santo Fransiskus Xaverius Ambon, Maluku, Indonesia

¹ gabrieljuniorell@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted: 10 September 2025

Revised: 18 Oktober 2025

Accepted: 03 Desember 2025

Keywords:

*Civic Virtue, Givenness,
Multicultural Society,
Tolerance, the Other*

Kata-kata Kunci:

*Kebajikan Warga Negara,
Masyarakat Multikultural,
Pemberian, Toleransi, Yang
Lain*

DOI: [10.62095/jl.v13i2.193](https://doi.org/10.62095/jl.v13i2.193)

ABSTRACT

Multicultural societies often face challenges such as intergroup conflict, intolerance, and social injustice, which arise from the inability to accept differences. Tolerance, as a “civic virtue,” is key to maintaining social harmony. This article aims to explain the relevance of Jean-Luc Marion’s phenomenological concept of givenness in understanding tolerance. Through a literature review and philosophical analysis, this research explores how the concept of givenness, which emphasizes the unconditional acceptance of “the other,” can serve as a philosophical framework for accepting differences and fostering tolerance. The results show that the principle of givenness encourages humility, openness, and respect for diversity, which are the foundations of tolerance and civic virtue. However, the application of this concept faces challenges in addressing structural injustice. This article offers Marion’s thoughts as a basis for developing tolerance in multicultural societies, creating an inclusive, harmonious, and just life together.

ABSTRAK

Masyarakat multikultural sering dihadapkan pada tantangan seperti konflik antarkelompok, intoleransi, dan ketidakadilan sosial, yang muncul akibat ketidakmampuan menerima perbedaan. Toleransi, sebagai “kebakikan kewarganegaraan,” menjadi kunci untuk menjaga harmoni sosial. Artikel ini bertujuan menjelaskan relevansi konsep fenomenologi pemberian (*givenness*)

Jean-Luc Marion dalam memahami toleransi. Melalui studi literatur dan analisis filosofis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana konsep *givenness* yang menekankan penerimaan tanpa syarat terhadap “yang lain” (the other) dapat menjadi kerangka filosofis untuk menerima perbedaan dan membangun toleransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *givenness* mendorong sikap rendah hati, keterbukaan, dan penghormatan terhadap keberagaman, yang menjadi fondasi bagi toleransi dan kebajikan kewarganegaraan. Namun, penerapan konsep ini menghadapi tantangan dalam mengatasi ketidakadilan struktural. Artikel ini menawarkan pemikiran Marion sebagai dasar untuk mengembangkan sikap toleransi dalam masyarakat multikultural, menciptakan kehidupan bersama yang inklusif, harmonis, dan berkeadilan.

Copyright © 2025 by LOGOS STPAK Ambon



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENDAHULUAN

Masyarakat multikultural, yang terdiri dari beragam identitas budaya, agama, dan etnis, kerap menghadapi tantangan serius seperti konflik antarkelompok, intoleransi, dan ketidakadilan sosial. Masalah-masalah ini sering muncul karena kurangnya kemampuan untuk memahami dan menerima perbedaan, yang kemudian memicu polarisasi serta fragmentasi dalam masyarakat. Di berbagai belahan dunia, ketegangan antarkelompok tidak jarang dipicu oleh klaim kebenaran absolut yang mengesampingkan hak-hak kelompok lain. Situasi seperti ini tidak hanya mengancam stabilitas dan kohesi sosial, tetapi juga menghambat upaya menciptakan keadilan sosial yang bersifat inklusif. Klaim kebenaran yang eksklusif sering kali menutup ruang dialog dan menghalangi pengakuan terhadap keberagaman. Akibatnya, masyarakat rentan terpecah dan kehilangan rasa solidaritas antarkelompok. Maka dari itu, diperlukan solusi yang mampu mengatasi akar masalah ini demi menciptakan kehidupan bersama yang harmonis dan berkeadilan.¹

Dalam konteks ini, toleransi muncul sebagai *civic virtue* (kebajikan kewarganegaraan) yang sangat penting untuk menjaga dan memelihara harmoni sosial. Toleransi bukan sekadar sikap pasif menerima perbedaan, melainkan kemampuan aktif untuk mengakui dan menghormati keberadaan “yang lain” (*the other*) dalam ruang publik.² Sebagai kebajikan kewarganegaraan, toleransi berperan sebagai fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang adil dan demokratis. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, setiap individu dapat hidup berdampingan tanpa rasa takut terhadap diskriminasi atau kekerasan. Toleransi membuka ruang bagi dialog dan saling menghargai keberagaman. Oleh karena itu, toleransi menjadi kunci utama dalam membangun tatanan sosial yang inklusif dan berkeadilan.³

Filsafat, dengan kekayaan kerangka konseptualnya, memainkan peran penting dalam memahami dan mempraktikkan toleransi. Salah satu kontribusi penting datang dari pemikiran Jean-Luc Marion, seorang filsuf fenomenologi kontemporer, melalui konsep “pemberian” (*the gift*). Marion menawarkan perspektif baru tentang relasi antarsubjek, di mana penerimaan terhadap “yang lain” tidak didasarkan pada logika timbal balik, melainkan pada kesediaan untuk menerima tanpa syarat. Konsep ini relevan untuk membangun toleransi dalam masyarakat multikultural, karena mengajak

¹ Charles Taylor, *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition* (Princeton: Princeton University Press, 1994), 62.

² Michael Walzer, *On Toleration* (New Haven: Yale University Press, 1997), 10.

³ Martha Nussbaum, *The New Religious Intolerance: Overcoming the Politics of Fear in an Anxious Age* (Cambridge: Harvard University Press, 2012), 78.

kita untuk melampaui egoisme dan prasangka, serta membuka diri terhadap keberadaan orang lain secara otentik.⁴

Almudena Molina dalam artikel berjudul “Redefining Tolerance: Accepting the Gift,”⁵ mengeksplorasi toleransi melalui paradigma Rahmat (gift), dengan mengacu pada fenomenologi keterberiaan (givenness) Jean-Luc Marion dan implikasinya terhadap toleransi sosial dan politik. Artikel ini mengusulkan konseptualisasi alternatif toleransi dalam paradigma anugerah: toleransi sebagai penerimaan anugerah. Keberadaan anugerah menuntut toleransi terhadap implikasi disruptifnya: perjumpaan dengan yang lain dan pengakuan akan utang yang mendasarinya. Menurutinya, penerimaan radikal atas anugerah mengharuskan pengabaian paradigma kesamaan demi perbedaan dan pengakuan atas ketidakmungkinan menyelesaikan masalah toleransi secara abstrak. Sementara tradisi liberal mengutamakan kebebasan individu, toleransi dari perspektif anugerah menuntut kebajikan-kebajikan komunitarian, yaitu keramahtamahan, tanggung jawab, dan pengampunan.

C. Casram, dalam artikel berjudul “Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural,”⁶ menyatakan bahwa toleransi beragama yang ideal harus dibangun melalui partisipasi aktif dari seluruh umat beragama untuk mencapai tujuan yang sama berdasarkan kebersamaan, sikap inklusif, rasa hormat, dan saling pengertian terkait pelaksanaan ritual dan doktrin masing-masing agama. Dengan metode penulisan kepustakaan, Casram menyimpulkan penelitiannya bahwa pemahaman dan penerapan doktrin-doktrin keagamaan kita hendaknya tidak berhenti pada klaim eksklusivisme (“Aku”) yang berpuncak pada perwujudan hubungan personal dengan Tuhan (soliter), maupun klaim inklusivisme (“Kamu”) yang berfokus pada perekrutan sekutu teologis dan ideologis (solidaritas), melainkan juga pada keterbukaan (“Kita”) yang menekankan pemahaman keagamaan kita tentang nilai-nilai kemanusiaan (humanis-fungsional). Lebih lanjut, semua pihak hendaknya menanggukuhkan penghakiman teologis maupun ideologis yang ditujukan kepada komunitas agama lain. Inilah semacam epoche fenomenologis yang perlu kita ambil jika kita ingin mewujudkan toleransi beragama dan tidak membiarkannya hanya pada tataran wacana.

Shofiah Fitriani, dalam artikel berjudul “Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama,”⁷ menyatakan bahwa toleransi dalam beragama merupakan sebuah keniscayaan untuk menjamin stabilitas sosial dari paksaan ideologis maupun berupa

⁴ Jean-Luc Marion, *Being Given: Toward a Phenomenology of Givenness* (Stanford: Stanford University Press, 2002), 112.

⁵ Almudena Molina, “Redefining Tolerance: Accepting the Gift,” *Philosophy & Social Criticism*, (2025): <https://doi.org/10.1177/01914537251377670>.

⁶ C. Casram, “Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1, no. 2, (2016): 187–198, <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>.

⁷ Shofiah Fitriani, “Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 2, (2020): 179–192, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.5489>.

bentrok fisik dalam masyarakat. Perbedaan agama seharusnya untuk saling mengakui, saling menghormati, dan bekerja sama dalam kebajikan. Perbedaan keyakinan agama bukan menjadi faktor pendorong untuk saling menjatuhkan, saling merendahkan, atau mencampuradukkan antar agama yang satu dengan yang lain. Melalui penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif, penulis menyimpulkan bahwa toleransi merupakan sikap saling menghormati yang berhubungan antar agama dan merupakan kebebasan dalam beragama dan beribadah.

Abdul Hafiz, Leli Romdaniah, Rasya Ahmad Nizar, dan Syifa Mauliza, dalam artikel berjudul “Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural: Inisiatif Pendidikan, Kebijakan Publik, dan Peran Media dalam Membentuk Sikap Toleransi,”⁸ menguraikan bagaimana masyarakat yang beragam dalam hal keyakinan dan kepercayaan dapat mencapai koeksistensi yang harmonis melalui pemahaman, dialog, dan penghargaan terhadap perbedaan. Fokus artikel adalah menganalisis bagaimana inisiatif pendidikan, kebijakan publik, dan peran media dalam membentuk sikap toleransi sejak dini. Artikel ini menyimpulkan dengan menekankan pentingnya menerapkan pendekatan inklusif dalam mempromosikan toleransi beragama, yang melibatkan pendidikan yang mendalam, dialog antaragama, dan peran aktif masyarakat sipil. Pemahaman dan penerimaan terhadap pluralitas keyakinan dianggap sebagai kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan bersatu meskipun perbedaan keyakinan agama.

Uraian di atas menunjukkan bahwa konsep Marion belum banyak digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi toleransi beragama, khususnya di Indonesia. Tulisan ini mengisi kekosongan tersebut sekaligus menjadi *pioneer* yang menawarkan konsep Marion tentang fenomenologi pemberian sebagai dasar bagi toleransi beragama dalam masyarakat, khususnya di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah menguraikan, menganalisis dan mengeksplorasi relevansi fenomenologi pemberian Jean-Luc Marion dalam konteks toleransi, khususnya dalam masyarakat multikultural yang terus berjuang menghadapi tantangan intoleransi dan ketidakadilan sosial.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian filosofis, khususnya *analisis tekstual dan interpretasi konseptual*. Istilah ‘analisis tekstual’ mengacu pada teknik penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan, menafsirkan, dan memahami teks. Analisis teks bertujuan untuk mengaitkan teks dengan konteks sosial, politik, budaya, atau artistik lebih luas. Ini

⁸ Abdul Hafiz, Leli Romdaniah, Rasya Ahmad Nizar, dan Syifa Mauliza, “Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural: Inisiatif Pendidikan, Kebijakan Publik, dan Peran Media dalam Membentuk Sikap Toleransi,” *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (Februari 2024): 120-130, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.916>.

mencakup berbagai informasi dari teks, mulai dari makna asli hingga subteks, simbolisme, asumsi, dan nilai-nilai yang diungkapkan.⁹ Sedangkan analisis konseptual adalah proses mengeksplorasi struktur konseptual suatu topik atau materi. Tujuan dari analisis konseptual ini adalah untuk menemukan konsep mana yang relevan dan bagaimana konsep-konsep tersebut berhubungan satu sama lain.¹⁰

Dalam konteks penelitian ini, artikel ini mendeskripsikan, dan menafsirkan konsep-konsep Jean-Luc Marion dan mengeksplorasi relevansi konsep fenomenologi pemberian Jean-Luc Marion dan mengaplikasikannya dalam konteks toleransi dalam masyarakat multikultural.

PEMBAHASAN

Jean-Luc Marion dan Latar Belakang Pemikirannya

Jean-Luc Marion adalah seorang filsuf Prancis kontemporer yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam fenomenologi dan teologi postmodern. Lahir pada tahun 1946, Marion merupakan murid dari pemikir terkemuka seperti Jacques Derrida dan Louis Althusser, yang memengaruhi perkembangan intelektualnya. Ia menjabat sebagai profesor di berbagai universitas bergengsi, termasuk Universitas Paris-Sorbonne dan Universitas Chicago, serta menjadi anggota Académie française sejak 2008. Marion dikenal karena upayanya mereformasi fenomenologi dengan memperkenalkan konsep *givenness* (pemberian) sebagai prinsip sentral dalam memahami fenomena. Karyanya, seperti *Being Given: Toward a Phenomenology of Givenness* dan *The Erotic Phenomenon*, telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang filsafat, khususnya dalam membahas relasi antara subjek, obyek, dan “yang lain” (*the other*).

Latar belakang pemikiran Marion tidak dapat dipisahkan dari pengaruh fenomenologi Edmund Husserl dan Martin Heidegger, meskipun ia mengkritik keduanya karena kecenderungan mereka untuk mereduksi fenomena ke dalam kerangka subjektivitas atau keberadaan (*Being*). Marion berargumen bahwa fenomena harus dipahami sebagai sesuatu yang “memberi diri” (*gives itself*) secara utuh dan tanpa syarat, melampaui batas-batas pemahaman manusia.¹¹ Selain itu, pemikiran Marion juga dipengaruhi oleh tradisi teologi Kristen, khususnya pemikiran Santo Agustinus dan Pascal, yang membawa dimensi spiritual dan etis dalam analisis fenomenologisnya. Kombinasi antara fenomenologi dan teologi ini menjadikan pemikiran Marion unik dan

⁹ Jack Caulfield, “Textual Analysis Guide: 3 Approaches & Examples,” 7 May 2022, <https://www.scribbr.co.uk/research-methods/textual-analysis-explained/#:~:text=Analisis%20tekstual%20adalah%20istilah%20umumdan%20nilai%20nilai%20yang%20diungkapkannya> (dikases 20 November 2025).

¹⁰ Keith S. Taber, “Conceptual Analysis,” <https://science-education-research.com/teaching-science/conceptual-analysis/> (dikases 20 November 2025).

¹¹ Jean-Luc Marion, *Being Given: Toward a Phenomenology of Givenness* (Stanford: Stanford University Press, 2002), 2-5.

relevan tidak hanya dalam filsafat kontinental, tetapi juga dalam diskusi tentang etika, toleransi, dan relasi antarmanusia.¹²

Konsep Fenomenologi Pemberian (*Givenness*)

Fenomenologi pemberian (*phenomenology of givenness*) merupakan inti dari pemikiran Jean-Luc Marion, dimana ia menekankan bahwa realitas paling mendasar dari fenomena adalah kemampuannya untuk “memberi diri” (*give itself*) secara utuh dan tanpa syarat. Marion mengkritik tradisi fenomenologi sebelumnya, seperti yang diajukan oleh Edmund Husserl dan Martin Heidegger, yang cenderung mereduksi fenomena ke dalam kerangka subjektivitas atau keberadaan (*Being*). Bagi Marion, *givenness* adalah prinsip pertama fenomenologi karena fenomena hanya dapat dipahami sepenuhnya ketika ia diberikan secara langsung kepada kesadaran kita tanpa distorsi atau reduksi.¹³

Salah satu aspek penting dari konsep ini adalah penerimaan terhadap “yang lain” (*the other*) tanpa reduksi atau prasangka. Marion menegaskan bahwa “yang lain” harus diterima sebagaimana adanya, tanpa upaya untuk menguasai atau menginterpretasikannya melalui kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pandangannya, “yang lain” selalu melampaui upaya kita untuk memahaminya secara penuh, dan justru dalam ketidakterjangkauan inilah keunikan dan martabatnya terletak.¹⁴ Hal ini menuntut sikap keterbukaan dan kerendahan hati dari subjek untuk menerima kehadiran “yang lain” sebagai sebuah pemberian yang tak terduga dan tak terbatas.

Peran subjek dalam fenomenologi Marion bukanlah sebagai pencipta makna yang aktif, melainkan sebagai penerima (*receiver*) yang pasif namun terbuka. Subjek dipanggil untuk menerima pemberian yang datang kepadanya tanpa berusaha mengontrol atau memanipulasinya. Marion menyebut kondisi ini sebagai “kepasifan radikal” (*radical passivity*), di mana subjek membiarkan dirinya diisi oleh kehadiran fenomena yang diberikan. Kepasifan ini bukanlah kelemahan, melainkan bentuk keterbukaan yang memungkinkan subjek untuk mengalami kebenaran dan keindahan dari “yang lain” secara otentik.¹⁵ Dengan demikian, fenomenologi pemberian Marion menawarkan cara baru untuk memahami relasi antarsubjek, yang berpotensi menjadi dasar bagi toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat multikultural.

¹² Robyn Horner, *Jean-Luc Marion: A Theo-Logical Introduction* (Aldershot: Ashgate, 2005), 23-25.

¹³ Marion, *Being Given*, 5-7.

¹⁴ Marion, *Being Given*, 215-217.

¹⁵ Jean-Luc Marion, *The Erotic Phenomenon* (Chicago: University of Chicago Press, 2007), 89-91.

Relevansi Konsep “Givenness” Bagi Toleransi

Konsep *givenness* (pemberian) dalam pemikiran Jean-Luc Marion menawarkan perspektif filosofis yang mendalam tentang toleransi, terutama dalam konteks menerima perbedaan tanpa syarat. Toleransi, dalam pandangan ini, bukan sekadar sikap pasif menoleransi keberadaan orang lain, melainkan kesediaan aktif untuk menerima “yang lain” sebagaimana adanya, tanpa upaya untuk mereduksi atau mengasimilasi mereka ke dalam kerangka pemahaman kita sendiri. Marion menekankan bahwa penerimaan terhadap “yang lain” harus dilakukan dengan kerendahan hati dan keterbukaan, karena setiap individu atau kelompok memiliki martabat dan keunikan yang tidak dapat sepenuhnya dipahami atau dikuasai.¹⁶

Hubungan antara *givenness* dan pengakuan terhadap “yang lain” menjadi sangat relevan dalam masyarakat multikultural, di mana keberagaman budaya, agama, dan etnis sering menjadi sumber konflik. Fenomenologi pemberian mengajarkan bahwa “yang lain” harus diterima sebagai pemberian yang melampaui batas-batas pemahaman kita. Dalam konteks ini, toleransi dipahami sebagai kemampuan untuk mengakui dan menghormati keberadaan “yang lain” tanpa prasangka atau klaim kebenaran absolut. Hal ini sejalan dengan pemikiran Charles Taylor, yang menegaskan bahwa pengakuan terhadap identitas orang lain adalah prasyarat bagi keadilan sosial dalam masyarakat yang plural.¹⁷

Contoh praktis dari penerapan konsep ini dapat dilihat dalam upaya menerima identitas budaya, agama, dan etnis yang berbeda. Misalnya, dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, toleransi dapat diwujudkan melalui sikap menghormati praktik keagamaan atau tradisi budaya kelompok lain tanpa merasa terancam atau perlu mengintervensi. Marion mengingatkan bahwa penerimaan seperti ini memerlukan kepasifan radikal, di mana kita membiarkan diri kita diisi oleh kehadiran “yang lain” tanpa berusaha mengontrol atau mengubahnya.¹⁸ Dengan demikian, konsep *givenness* tidak hanya memperkaya pemahaman filosofis tentang toleransi, tetapi juga memberikan kerangka praktis untuk membangun harmoni sosial dalam masyarakat yang beragam.

Pentingnya Civic Virtue Dalam Masyarakat Multikultural

Toleransi, sebagai bagian dari *civic virtue* (kebajikan kewarganegaraan), memegang peran sentral dalam menjaga dan memelihara harmoni sosial, terutama dalam masyarakat yang plural dan kompleks. Terkait itu, berikut ini akan dideskripsikan mengenai pengertian *civic virtue* menurut beberapa ahli, terutama

¹⁶ Marion, *Being Given*, 113-117.

¹⁷ Taylor, *Multiculturalism*, 36-38.

¹⁸ Marion, *The Erotic Phenomenon*, 89-91.

William Galston dan mengapa *civic virtue* itu penting untuk diterapkan dalam menghadapi realitas masyarakat yang multikultural.

Istilah *virtue* (kebajikan atau keutamaan) sering dikaitkan dengan posisi dan peran manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Montesquieu menegaskan bahwa kebajikan berkaitan dengan prinsip dan pemerintahan republik. Kebajikan dalam republik adalah cinta terhadap negeri, cinta akan kesetaraan. Kebajikan ini bukan sekadar kebajikan moral atau religius, melainkan kebajikan publik yang bersumber dari kehendak dan kesepakatan bersama untuk kepentingan umum.¹⁹ Dari definisi ini tampak bahwa Montesquieu ingin menekankan pengertian kebajikan sebagai nilai-nilai positif yang bersumber dari kehendak dan kesepakatan bersama. Secara implisit berarti, apa yang dikehendaki dan diputuskan secara kolektif demi kepentingan dan kebaikan bersama dalam satu kesatuan politik, itulah kebajikan.

Civic virtue atau kebajikan kewarganegaraan mencerminkan kemauan warga negara untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kebajikan ini terdiri dari dua unsur utama, yaitu watak kewarganegaraan (*civic disposition*) dan komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*). Watak kewarganegaraan merujuk pada kebiasaan dan sikap warga yang mendukung fungsi sosial yang sehat, sementara komitmen kewarganegaraan mencerminkan kesediaan untuk memegang teguh nilai-nilai demokratis, seperti toleransi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.²⁰ Toleransi, sebagai bagian dari watak kewarganegaraan, menuntut sikap terbuka dan penerimaan terhadap “yang lain” (*the other*) tanpa prasangka atau upaya untuk mereduksi identitas mereka. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jean-Luc Marion tentang fenomenologi pemberian (*givenness*), di mana “yang lain” harus diterima sebagai pemberian yang melampaui batas pemahaman kita.

Menurut Quigley, kebajikan kewarganegaraan mencakup karakter, disposisi, dan komitmen yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tata pemerintahan yang demokratis. Contoh kebajikan ini termasuk toleransi, penghormatan terhadap martabat setiap orang, integritas, dan dedikasi terhadap kebaikan bersama.²¹ Toleransi, dalam hal ini, bukan sekadar sikap pasif menerima perbedaan, melainkan kemampuan aktif untuk mengakui dan menghargai keberagaman sebagai bagian dari kehidupan bersama. Senada dengan Quigley, Bray dan Larry menegaskan bahwa kebajikan kewarganegaraan adalah karakter dan keterampilan pribadi yang diperlukan untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara bermakna. Toleransi,

¹⁹ Charles N Quigley and Charles F. Bahmueller, *Civitas: A Framework for Civic Education*, (Calabasas: Center for Civic Education, 1991), 11.

²⁰ Winarno, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi dan Penilaian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 181.

²¹ Charles N. Quigley, *Civic Education: Recent History, Current Status, and the Future* (Calabasas: Center for Civic Education, 1999), 12.

sebagai bagian dari kebajikan ini, memberikan kemampuan untuk mempromosikan kepentingan bersama dan menghadapi tantangan dalam masyarakat yang plural.²²

Selain itu, William Arthur Galston memahami kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*) sebagai kemampuan individu untuk mengembangkan kualitas diri, bekerja sama dengan orang lain, dan memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok, dengan tujuan agar demokrasi dapat berkembang secara sehat. Kesadaran akan pentingnya kebajikan kewarganegaraan muncul dari realitas pluralitas dalam masyarakat modern. Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan beragam, kebajikan kewarganegaraan menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis, rukun, dan sejahtera.²³

Galston membagi kebajikan kewarganegaraan menjadi empat kelompok, yakni:²⁴ *Pertama*, kebajikan umum, seperti keberanian, kepatuhan pada hukum, dan kesetiaan. *Kedua*, kebajikan sosial, seperti kemandirian dan sikap terbuka. *Ketiga*, kebajikan ekonomi, seperti semangat kerja, kemampuan menunda kepuasan diri, dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi serta perkembangan teknologi. *Keempat*, kebajikan politis, seperti kemampuan menghormati hak orang lain, kesediaan meminta hal yang dapat dipertanggungjawabkan, kemampuan menilai kinerja pelayanan publik, dan kesediaan terlibat dalam wacana publik. Terkait itu, menurut Galston, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sarana penting untuk mengembangkan kebajikan kewarganegaraan, terutama di kalangan generasi muda. Melalui pendidikan, nilai-nilai seperti toleransi, keterbukaan, dan penghormatan terhadap keberagaman dapat diajarkan sebagai bagian dari pembentukan *civic virtue*.

Melalui internalisasi *civic virtue*, termasuk toleransi, akan terbentuk sikap dan perilaku kewarganegaraan yang baik. Toleransi membantu membentuk jiwa yang menghormati orang lain, memiliki disiplin dan tanggung jawab, serta peka terhadap masalah kemanusiaan. Sikap ini juga mendorong keterbukaan dan kesabaran dalam menghadapi perbedaan, yang merupakan esensi dari pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam konteks fenomenologi pemberian Jean-Luc Marion, toleransi sebagai kebajikan kewarganegaraan tidak dipahami sebagai sikap pasif yang meniadakan tanggung jawab etis, melainkan sebagai keterbukaan radikal untuk menerima kehadiran “yang lain” sebagaimana ia menampilkan dirinya sebagai pemberian. Subjek tidak terlebih dahulu menguasai atau mereduksi yang lain ke dalam kategori konseptualnya sendiri, tetapi membiarkan dirinya disapa oleh fenomena yang

²² Bernard L. Bray and Larry W. Chappell, *Civic Virtues and Public Schooling* (New York: Teachers College Press, 1996), 45.

²³ William A. Galston, *Liberal Purposes: Goods, Virtues, and Diversity in the Liberal State* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 227.

²⁴ Felix Baghi, *Kewarganegaraan Demokratis Dalam Sorotan Filsafat Politik* (Mauere: Ledalero, 2009), 413-414.

memberi diri. Artinya, toleransi tidak berarti membiarkan segala sesuatu tanpa penilaian, melainkan kesiapsediaan untuk membangun relasi dialogis yang menghormati martabat yang lain dalam kehidupan bersama. Penerimaan ini menjadi dasar bagi terciptanya harmoni sosial dalam masyarakat multikultural.²⁵

Dengan demikian, toleransi sebagai bagian dari *civic virtue* tidak hanya memperkuat hubungan antarwarga negara, tetapi juga menciptakan fondasi bagi kehidupan bersama yang harmonis dan berkeadilan. Dalam kerangka pemikiran Marion, toleransi yang didasarkan pada prinsip *givenness* menawarkan cara baru untuk memahami dan mempraktikkan kebajikan kewarganegaraan, terutama dalam menghadapi tantangan pluralitas dan kompleksitas masyarakat modern. Pendidikan kewarganegaraan, sebagai sarana untuk mengembangkan *civic virtue*, dapat mengintegrasikan prinsip *givenness* ini untuk menanamkan nilai-nilai penerimaan dan keterbukaan sebagai fondasi bagi kehidupan demokratis yang inklusif.

Aplikasi Dalam Masyarakat Multikultural

Konsep *givenness* (pemberian) dalam pemikiran Jean-Luc Marion menawarkan kerangka filosofis yang relevan untuk membangun toleransi sebagai *civic virtue* (kebajikan kewarganegaraan) dalam masyarakat multikultural. Pertama, konsep ini mendorong terciptanya dialog antarkelompok yang didasarkan pada prinsip penerimaan. Dalam fenomenologi Marion, “yang lain” (*the other*) harus diterima sebagaimana adanya, tanpa upaya untuk mereduksi atau mengontrolnya. Prinsip ini dapat diaplikasikan dalam konteks sosial dengan menciptakan ruang dialog yang inklusif, di mana setiap kelompok dapat menyampaikan identitas dan pengalamannya tanpa takut dihakimi atau diabaikan.²⁶ Dialog semacam ini memungkinkan terjadinya pertukaran pemahaman yang mendalam, yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial dan mengurangi potensi konflik.

Kedua, konsep *givenness* membantu mengatasi prasangka dan stereotip melalui sikap terbuka. Marion menekankan bahwa penerimaan terhadap “yang lain” harus dilakukan dengan kerendahan hati dan keterbukaan, karena setiap individu atau kelompok memiliki martabat yang tidak dapat sepenuhnya dipahami atau dikuasai.²⁷ Dalam masyarakat multikultural, prasangka dan stereotip sering kali muncul akibat ketidakmampuan untuk melihat “yang lain” sebagai pemberian yang unik dan berharga. Dengan mengadopsi sikap terbuka yang diajarkan oleh Marion, masyarakat dapat belajar untuk menghargai perbedaan dan melihatnya sebagai kekayaan, bukan ancaman.

Ketiga, peran pendidikan dan kebijakan publik menjadi krusial dalam mempromosikan toleransi berdasarkan prinsip *givenness*. Pendidikan kewarganegaraan

²⁵ Marion, *Being Given*, 87-94.

²⁶ Marion, *Being Given*, 215-217.

²⁷ Marion, *Being Given*, 113-118.

dapat dirancang untuk menanamkan nilai-nilai penerimaan dan keterbukaan, sambil mengajarkan pentingnya menghormati keberagaman. Kebijakan publik juga dapat mendukung upaya ini dengan menciptakan lingkungan yang memfasilitasi interaksi positif antarkelompok, seperti program pertukaran budaya atau forum dialog antaragama.²⁸ Melalui kombinasi pendidikan dan kebijakan yang tepat, masyarakat dapat menginternalisasi nilai-nilai toleransi dan menjadikannya sebagai bagian dari *civic virtue* yang mendukung kehidupan bersama yang harmonis.

Dengan demikian, konsep *givenness* dari Jean-Luc Marion memberikan dasar filosofis yang kuat untuk membangun toleransi dalam masyarakat multikultural. Prinsip penerimaan terhadap “yang lain” mendorong dialog inklusif yang memperkuat kohesi sosial dan mengurangi konflik. Sikap terbuka terhadap keberagaman membantu mengatasi prasangka serta stereotip, sehingga perbedaan dipandang sebagai kekayaan, bukan ancaman. Selain itu, melalui pendidikan dan kebijakan publik yang mendukung nilai-nilai keterbukaan, toleransi dapat ditanamkan sebagai *civic virtue* yang memperkuat kehidupan bersama yang harmonis.

Fenomenologi Pemberian dan Civic Virtue (Kebajikan Kewarganegaraan)

Konsep *givenness* (pemberian) dalam pemikiran Jean-Luc Marion memberikan dasar filosofis yang kuat untuk memahami toleransi sebagai bagian dari *civic virtue* (kebajikan kewarganegaraan). Dalam fenomenologi Marion, *givenness* menekankan penerimaan terhadap “yang lain” (*the other*) tanpa syarat, tanpa upaya untuk mereduksi atau mengontrolnya. Prinsip ini selaras dengan toleransi sebagai kebajikan kewarganegaraan, di mana warga negara diajak untuk menerima dan menghormati perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama. Toleransi, dalam konteks ini, bukan sekadar sikap pasif, melainkan kesediaan aktif untuk mengakui keberadaan dan martabat “yang lain” dalam ruang publik.²⁹

Penerimaan tanpa syarat terhadap “yang lain” dapat memperkuat kebajikan kewarganegaraan, seperti tanggung jawab sosial, solidaritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan menerima “yang lain” sebagai pemberian yang melampaui pemahaman kita, individu diajak untuk mengembangkan sikap rendah hati dan terbuka, yang merupakan fondasi bagi tanggung jawab sosial. Solidaritas juga tumbuh dari kesadaran bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama dan berhak diakui dalam keberagamannya. Selain itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi lebih bermakna ketika didasarkan pada prinsip penerimaan tanpa syarat, karena hal ini mengakui hak setiap individu untuk hidup sesuai dengan identitas dan keyakinannya.³⁰

²⁸ Quigley, *Civic Education*, 23-25.

²⁹ Marion, *Being Given*, 234-236.

³⁰ Taylor, *Multiculturalism*, 36-38.

Contoh konkrit penerapan konsep ini dapat dilihat dalam konteks relasi antaragama atau antaretnis yang harmonis. Misalnya, dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, toleransi antaragama dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati praktik keagamaan masing-masing kelompok tanpa merasa terancam atau perlu mengintervensi. Fenomenologi pemberian mengajarkan bahwa setiap agama atau etnis harus diterima sebagai pemberian yang unik dan berharga, bukan sebagai ancaman. Dengan demikian, dialog antaragama atau antaretnis dapat berlangsung lebih produktif, karena didasarkan pada prinsip penerimaan dan penghormatan, bukan prasangka atau ketakutan.³¹

Dengan demikian, konsep *givenness* (pemberian) dalam pemikiran Jean-Luc Marion memberikan landasan filosofis yang kuat untuk memahami toleransi sebagai bagian integral dari *civic virtue* (kebijaksanaan kewarganegaraan). Prinsip penerimaan tanpa syarat terhadap “yang lain” (*the other*) mendorong individu untuk mengembangkan sikap rendah hati, terbuka, dan menghormati keberagaman, yang merupakan fondasi bagi tanggung jawab sosial, solidaritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Contoh konkretnya dapat dilihat dalam relasi antaragama atau antaretnis yang harmonis, di mana prinsip *givenness* mengajarkan penerimaan terhadap perbedaan sebagai pemberian yang berharga, bukan sebagai ancaman. Melalui penerapan konsep ini, masyarakat multikultural dapat membangun dialog yang produktif dan kehidupan bersama yang lebih inklusif, adil, dan harmonis.

Givenness dan Keadilan Sosial Dalam Masyarakat Multikultural

Konsep *givenness* (pemberian) dalam pemikiran Jean-Luc Marion memiliki relevansi yang signifikan dengan upaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat multikultural. Hubungan antara *givenness* dan keadilan sosial terletak pada prinsip penerimaan tanpa syarat terhadap “yang lain” (*the other*), yang mendorong pengakuan terhadap martabat dan hak setiap individu, terlepas dari latar belakang budaya, agama, atau etnis mereka. Dalam konteks masyarakat multikultural, keadilan sosial tidak hanya tentang distribusi sumber daya yang adil, tetapi juga tentang pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman identitas. Prinsip *givenness* mengajarkan bahwa setiap orang harus diterima sebagaimana adanya, tanpa prasangka atau upaya untuk mereduksi identitas mereka, sehingga menciptakan fondasi bagi keadilan yang inklusif.³²

Prinsip penerimaan tanpa syarat dapat mendorong distribusi sumber daya yang lebih adil dan inklusif. Dengan menerima “yang lain” sebagai pemberian yang unik dan berharga, masyarakat dapat mengembangkan kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok-kelompok marginal. Misalnya, dalam konteks

³¹ Nussbaum, *The New Religious Intolerance*, 78-80.

³² Jean-Luc Marion, *Givenness and Revelation* (Oxford: Oxford University Press, 2016), 62-64.

distribusi sumber daya pendidikan atau kesehatan, prinsip ini mendorong pendekatan yang mempertimbangkan keragaman budaya dan kebutuhan khusus setiap kelompok. Hal ini sejalan dengan pemikiran John Rawls tentang keadilan sebagai fairness, di mana keadilan sosial harus memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, terlepas dari latar belakang mereka.³³

Namun, tantangan dalam menerapkan prinsip *givenness* dalam sistem sosial yang timpang dan tidak setara tidak dapat diabaikan. Masyarakat multikultural sering kali dihadapkan pada ketidakadilan struktural yang mengakar, seperti diskriminasi rasial, ketimpangan ekonomi, dan marginalisasi kelompok minoritas. Dalam konteks ini, penerimaan tanpa syarat mungkin dianggap kurang memadai jika tidak disertai dengan upaya transformasi struktural yang lebih radikal. Misalnya, meskipun prinsip *givenness* mendorong penghormatan terhadap identitas budaya, hal ini tidak secara otomatis mengatasi ketimpangan ekonomi atau ketidakadilan sistemik yang dialami oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, pendekatan fenomenologis Marion perlu dilengkapi dengan analisis struktural dan kebijakan publik yang lebih komprehensif untuk menciptakan keadilan sosial yang nyata.

Dengan demikian, konsep *givenness* dalam pemikiran Jean-Luc Marion menawarkan perspektif penerimaan tanpa syarat yang dapat memperkuat keadilan sosial dalam masyarakat multikultural. Prinsip ini menekankan penghormatan terhadap identitas setiap individu serta distribusi sumber daya yang lebih adil dan inklusif. Namun, penerapannya menghadapi tantangan dalam mengatasi ketidakadilan struktural yang telah mengakar dalam masyarakat. Oleh karena itu, prinsip *givenness* perlu dilengkapi dengan analisis struktural dan kebijakan publik yang lebih komprehensif agar keadilan sosial dapat terwujud secara nyata.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dan Toleransi Berbasis Givenness

Konsep *givenness* (pemberian) Jean-Luc Marion dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan sebagai dasar untuk membangun toleransi dan *civic virtue* (kebajikan kewarganegaraan). Dalam konteks pendidikan, *givenness* dapat diajarkan sebagai prinsip filosofis yang menekankan penerimaan tanpa syarat terhadap “yang lain” (*the other*). Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan siswa pada pemikiran Marion tentang fenomena yang “memberi diri” secara utuh dan tanpa reduksi, serta mendorong mereka untuk menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kurikulum dapat mencakup diskusi tentang pentingnya menghormati perbedaan budaya, agama, dan etnis sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara.³⁴

³³ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 60-62.

³⁴ Jean-Luc Marion, *Reduction and Givenness: Investigations of Husserl, Heidegger, and Phenomenology* (Northwestern: Northwestern, University Press, 1998), 78-80.

Pentingnya mengajarkan nilai-nilai penerimaan dan keterbukaan dalam pendidikan kewarganegaraan tidak dapat diabaikan, karena hal ini merupakan fondasi bagi pembentukan *civic virtue*. Nilai-nilai ini membantu siswa mengembangkan sikap rendah hati, empati, dan kesediaan untuk menerima keberagaman sebagai kekayaan, bukan ancaman. Dengan memahami bahwa setiap individu atau kelompok memiliki martabat yang sama dan berhak diakui, siswa dapat tumbuh menjadi warga negara yang menghargai hak asasi manusia, keadilan sosial, dan solidaritas. Pendidikan kewarganegaraan yang berbasis *givenness* juga mendorong siswa untuk melihat perbedaan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai sumber konflik.³⁵

Contoh praktis dari penerapan konsep ini dapat dilihat dalam program pendidikan yang mendorong dialog antarbudaya dan penghargaan terhadap keberagaman. Misalnya, sekolah dapat mengadakan kegiatan pertukaran budaya, di mana siswa dari latar belakang yang berbeda berbagi cerita, tradisi, dan pengalaman hidup mereka. Program semacam ini tidak hanya memperkaya pemahaman siswa tentang keberagaman, tetapi juga mengajarkan mereka untuk menerima “yang lain” sebagai pemberian yang berharga. Selain itu, kurikulum dapat mencakup proyek-proyek kolaboratif yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang, sehingga mereka belajar bekerja sama dan menghargai kontribusi setiap individu.

Dengan demikian, konsep *givenness* (pemberian) Jean-Luc Marion dapat menjadi landasan filosofis yang efektif untuk mempromosikan toleransi melalui pendidikan kewarganegaraan. Dengan mengintegrasikan prinsip penerimaan tanpa syarat terhadap “yang lain” (*the other*) ke dalam kurikulum, siswa diajak untuk menghormati perbedaan budaya, agama, dan etnis sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan. Program-program praktis, seperti pertukaran budaya dan proyek kolaboratif, dapat memperkaya pemahaman siswa tentang keberagaman sekaligus mengajarkan nilai-nilai keterbukaan dan empati. Melalui pendekatan ini, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya membentuk *civic virtue*, tetapi juga menciptakan generasi warga negara yang inklusif, toleran, dan siap menghadapi tantangan masyarakat multikultural.

Kritik dan Tantangan

Meskipun konsep *givenness* (pemberian) dan *saturated phenomenon* dalam pemikiran Jean-Luc Marion menawarkan kontribusi filosofis yang mendalam bagi pemahaman tentang penerimaan terhadap “yang lain”, penerapannya dalam konteks sosial, budaya, dan kehidupan beragama tidak dapat dilakukan secara langsung dan tanpa pertimbangan kritis. Dalam fenomenologi Marion, fenomena dipahami sebagai sesuatu yang memberi dirinya secara melimpah kepada subjek, sehingga subjek dipanggil untuk menerima kehadirannya tanpa terlebih dahulu mereduksinya ke dalam

³⁵ Quigley, *Civic Education*, 23-25.

kategori konseptual yang telah ditentukan.³⁶ Pada tingkat antropologis, pendekatan ini memberikan sumbangan penting karena membantu manusia menerima kehadiran orang lain dalam kekayaan dan keunikannya sebagaimana ia menampakkan diri.

Namun demikian, dalam konteks budaya sebagai cara hidup dan cara berada bersama, penerimaan terhadap yang lain tidak dapat dipahami sebagai sikap pasif yang tanpa batas. Praktik sosial dan keagamaan sering kali melibatkan relasi kekuasaan, dominasi simbolik, maupun pemaksaan identitas yang dapat mengancam kebebasan kelompok lain. Dalam situasi demikian, toleransi tidak cukup dibangun hanya melalui penerimaan fenomenologis terhadap kehadiran yang lain, tetapi juga membutuhkan proses penilaian etis dan pembatasan normatif terhadap praktik-praktik yang berpotensi merugikan kehidupan bersama. Kritik ini menunjukkan bahwa fenomenologi pemberian perlu berdialog dengan etika sosial dan teori politik agar mampu menanggapi realitas konflik dan ketimpangan yang konkret.³⁷

Selain itu, dari sisi pemahaman subjek pada tingkat kognitif dan teoritis, kehadiran orang lain sebagai fenomena pemberian memang dapat diterima tanpa syarat, karena fenomena tersebut melampaui kapasitas konsep subjek. Akan tetapi, dalam praksis hidup bersama, khususnya dalam relasi antaragama dan keberagaman budaya, penerimaan tanpa syarat tidak selalu dapat diterapkan secara langsung. Kehidupan sosial menuntut adanya negosiasi nilai, tanggung jawab timbal balik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, pendekatan fenomenologis Marion sering dinilai memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan persoalan ketidakadilan struktural yang membutuhkan analisis sosiologis, politik, dan institusional yang lebih luas.³⁸

Kritik lain juga muncul dari perdebatan fenomenologi kontemporer yang menilai bahwa kecenderungan fenomenologi Prancis modern, termasuk Marion, membuka ruang yang sangat besar bagi dimensi teologis dalam analisis fenomenologis. Dominique Janicaud, misalnya, mempertanyakan apakah pendekatan tersebut masih berada dalam batas metodologis fenomenologi klasik atau justru bergerak menuju afirmasi teologis tertentu. Dalam konteks ruang publik yang plural dan sekuler, kritik ini menjadi penting karena toleransi tidak hanya berkaitan dengan pengalaman personal menerima yang lain, tetapi juga menyangkut rasionalitas publik dan legitimasi normatif bersama.³⁹

³⁶ Marion, *Being Given*, 222-275.

³⁷ Almudena Molina, "Redefining Tolerance: Accepting the Gift," *Philosophy & Social Criticism*, (2025): <https://doi.org/10.1177/01914537251377670>.

³⁸ Robyn Horner, *Jean-Luc Marion: A Theo-Logical*, 87-96.

³⁹ Dominique Janicaud, *Phenomenology and the Theological Turn* (New York: Fordham University Press, 2000), 16-30.

Dengan demikian, konsep *givenness* dan *saturated phenomenon* tetap memberikan kontribusi penting dalam membangun keterbukaan antropologis terhadap yang lain. Namun, untuk menghadirkan toleransi yang nyata dalam masyarakat multikultural, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan analisis etika sosial, teori keadilan, serta kebijakan publik yang mampu mengatasi dominasi struktural dan konflik konkret dalam kehidupan bersama.

KESIMPULAN

Konsep *givenness* (pemberian) Jean-Luc Marion menawarkan kerangka filosofis yang kuat untuk memahami toleransi sebagai sikap menerima “yang lain” (*the other*) tanpa syarat. Dalam fenomenologi Marion, penerimaan terhadap “yang lain” didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu atau kelompok memiliki martabat yang unik dan tidak dapat sepenuhnya dipahami atau dikuasai. Prinsip ini mendorong sikap rendah hati dan keterbukaan, yang menjadi fondasi bagi toleransi dalam masyarakat multikultural. Toleransi, dalam konteks ini, bukan sekadar sikap pasif, melainkan kesediaan aktif untuk mengakui dan menghormati keberagaman sebagai bagian dari kehidupan bersama. Dengan demikian, konsep *givenness* memberikan dasar filosofis yang mendalam untuk membangun relasi sosial yang inklusif dan penuh penghormatan. Hal ini menjadikan pemikiran Marion relevan tidak hanya dalam diskusi filosofis, tetapi juga dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Pemikiran Marion relevan bagi pengembangan kebijakan kewarganegaraan (*civic virtue*) dalam masyarakat multikultural. Kebijakan kewarganegaraan, seperti toleransi, tanggung jawab sosial, dan solidaritas, dapat diperkuat melalui prinsip penerimaan tanpa syarat terhadap “yang lain”. Dalam masyarakat yang semakin plural, kebijakan ini menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan harmoni sosial dan keadilan. Marion mengajarkan bahwa penerimaan terhadap perbedaan harus dilakukan dengan kerendahan hati dan keterbukaan, sehingga setiap individu merasa diakui dan dihargai. Dengan demikian, konsep *givenness* tidak hanya memperkaya pemahaman tentang toleransi, tetapi juga memberikan kerangka praktis untuk mengembangkan kebijakan kewarganegaraan. Hal ini menjadikan pemikiran Marion sebagai kontribusi penting bagi diskusi tentang etika dan relasi antarmanusia.

Konsep *givenness* juga menawarkan perspektif baru tentang keadilan sosial dalam masyarakat multikultural. Prinsip penerimaan tanpa syarat terhadap “yang lain” mendorong pengakuan terhadap martabat dan hak setiap individu, terlepas dari latar belakang budaya, agama, atau etnis mereka. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan distribusi sumber daya yang lebih adil dan inklusif. Namun, penerapan konsep ini menghadapi tantangan dalam mengatasi ketidakadilan struktural yang telah mengakar. Oleh karena itu, pendekatan fenomenologis Marion perlu dilengkapi dengan analisis struktural dan kebijakan publik yang lebih komprehensif. Dengan demikian, *givenness*

tidak hanya memperkaya pemahaman filosofis, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk menghadapi tantangan sosial.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana penting untuk mempromosikan toleransi berbasis *givenness*. Dengan mengintegrasikan prinsip penerimaan tanpa syarat ke dalam kurikulum, siswa diajak untuk menghormati perbedaan budaya, agama, dan etnis sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan. Program-program praktis, seperti pertukaran budaya dan proyek kolaboratif, dapat memperkaya pemahaman siswa tentang keberagaman. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai keterbukaan dan empati dapat ditanamkan sebagai fondasi bagi *civic virtue*. Pendidikan kewarganegaraan yang berbasis *givenness* tidak hanya membentuk warga negara yang toleran, tetapi juga menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan masyarakat multikultural. Dengan demikian, pendidikan menjadi jembatan penting antara pemikiran filosofis dan praktik kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, konsep *givenness* Jean-Luc Marion menawarkan kerangka filosofis yang kuat untuk memahami toleransi sebagai sikap menerima “yang lain” tanpa syarat. Pemikiran ini relevan bagi pengembangan kebajikan kewarganegaraan dalam masyarakat multikultural, karena menekankan pentingnya penerimaan dan penghormatan terhadap keberagaman. Melalui prinsip *givenness*, masyarakat dapat membangun dialog yang inklusif, mengatasi prasangka, dan menciptakan keadilan sosial yang lebih adil. Meskipun menghadapi tantangan dalam penerapannya, konsep ini memberikan dasar filosofis yang mendalam untuk menghadapi kompleksitas masyarakat modern. Dengan mengintegrasikan prinsip *givenness* ke dalam pendidikan dan kebijakan publik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, inklusif, dan berkeadilan. Dengan demikian, pemikiran Marion tidak hanya memperkaya diskusi filosofis, tetapi juga memberikan solusi praktis untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik.

BIBLIOGRAPHY

- Baghi, Felix. *Kewarganegaraan Demokratis Dalam Sorotan Filsafat Politik*. Maumere: Ledalero, 2009.
- Bray, Bernard L., and Larry W. Chappell. *Civic Virtues and Public Schooling*. New York: Teachers College Press, 1996.
- Casram, C. “Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural.” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1, No. 2, (2016): 187–198. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>.
- Caulfield, Jack. “Textual Analysis Guide: 3 Approaches & Examples.” 7 May 2022. <https://www.scribbr.co.uk/research-methods/textual-analysisexplained/#:~:text=Analisis%20tekstual%20adalah%20istilah%20umum,dan%20nilai%2Dnilai%20yang%20diungkapkannya> (diakses 20 November 2025).

- Fitriani, Shofiah. "Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, No. 2, (2020): 179-192. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.5489>.
- Galston, William A. *Liberal Purposes: Goods, Virtues, and Diversity in the Liberal State*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Horner, Robyn. *Jean-Luc Marion: A Theo-Logical Introduction*. Aldershot: Ashgate, 2005.
- Janicaud, Dominique. *Phenomenology and the Theological Turn*. New York: Fordham University Press, 2000.
- Marion, Jean-Luc. *Being Given: Toward a Phenomenology of Givenness*. Stanford: Stanford University Press, 2002.
- _____. *Givenness and Revelation*. Oxford: Oxford, University Press, 2016.
- _____. *Reduction and Givenness: Investigations of Husserl, Heidegger, and Phenomenology*. Northwestern: Northwestern, University Press, 1998.
- _____. *The Erotic Phenomenon*. Chicago: University of Chicago Press, 2007.
- Molina, Almudena. "Redefining Tolerance: Accepting the Gift." *Philosophy & Social Criticism*, (2025). <https://doi.org/10.1177/01914537251377670> .
- Nussbaum, Martha. *The New Religious Intolerance: Overcoming the Politics of Fear in an Anxious Age*. Cambridge: Harvard University Press, 2012.
- Quigley, Charles N. *Civic Education: Recent History, Current Status, and the Future*. Calabasas: Center for Civic Education, 1999.
- Quigley, Charles N., and Charles F. Bahmueller. *Civitas: A Framework for Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education, 1991.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Taber, Keith S. "Conceptual Analysis." <https://science-education-research.com/teaching-science/conceptual-analysis/> (diakses 20 November 2025).
- Taylor, Charles. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press, 1994.
- Walzer, Michael. *On Toleration*. New Haven: Yale University Press, 1997.
- Winarno. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.